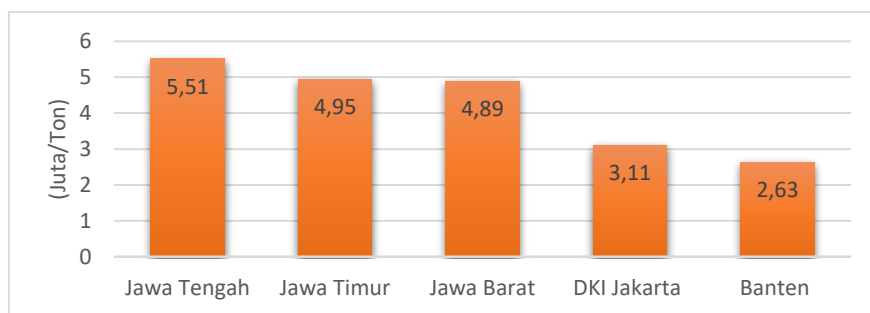


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-5 sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia (WorldBank, 2023). Menurut laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, Indonesia memproduksi sampah sekitar 65,2 juta ton sampah per tahun (Ahdiat, 2022). Oleh karenanya permasalahan pengelolaan sampah merupakan suatu tantangan besar bagi Indonesia. Permasalahan pengelolaan sampah ini tidak hanya terjadi di kota besar akan tetapi juga di kota kecil.



Gambar 1.1 Provinsi Penyumbang Sampah Terbanyak di Indonesia
Sumber : KLHK, 2023

Seluruh masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia memiliki kontribusi terhadap timbunan sampah nasional. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2022) rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kilogram per hari. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (2023), Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi Jawa Timur berada di posisi kedua sebagai penyumbang sampah terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 4,95 juta ton per tahun setelah Provinsi Jawa Tengah. Sampah yang dihasilkan Provinsi Jawa Timur tersebut

menyumbang 13,83 persen dari total 35,8 juta ton sampah secara nasional (KLHK, 2023).

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi dalam timbunan sampah. Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata jumlah sampah yang terakumulasi per hari di Kabupaten Bangkalan meningkat setiap tahunnya, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Menurut DLH (dinas lingkungan hidup) Kabupaten Bangkalan (2022) sampah yang dihasilkan mencapai hampir 0,316 kilogram per orang setiap harinya. Adapun sampah yang dihasilkan terdiri dari 67,6 persen sampah organik, 14,9 persen sampah plastik, 9,6 persen sampah kardus dan kertas, 7,9 persen logam (kaleng) dan sisanya adalah kaca dan lainnya. Dari komposisi tersebut, sampah plastik merupakan sampah non organik yang memiliki persentase tertinggi. Sampah plastik dianggap tidak dapat diurai secara hayati, karena plastik dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun tanpa terurai (Dewi & Raharjo, 2019).

Tabel 1. 1 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangkalan (Ton/Hari) 2018-2022

Keterangan	Volume Sampah Tahun 2018-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Timbunan Sampah	75	83, 039	85,1	91	91,2
Sampah Terangkut	38,39	38,502	60	65	65
Sampah Tidak Terangkut	36,61	44,537	25,1	25	26,2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2023

Peningkatan timbunan sampah dapat menjadi persoalan rumit dalam masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Seringkali, permasalahan pengelolaan sampah ini disebabkan oleh meningkatnya volume sampah di TPA (tempat pemrosesan akhir), tingginya biaya pengelolaan sampah dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah (Shafy dan Mansour, 2018). Mahyudin (2017) mengemukakan permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat sistem pengelolaan sampah, yaitu kurangnya dasar

hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan atau pendaur ulangan sampah organik dan anorganik dan kurangnya pengelolaan TPA (tempat pemrosesan akhir) dengan sistem yang tepat. Tanpa adanya upaya yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akan terus meningkat, seperti dapat menurunkan tingkat kesehatan, selain itu sampah juga mengurangi estetika, menimbulkan bau tidak sedap juga merusak ekosistem perairan maupun ekosistem darat (DLH Kabupayen Tanjung Jabung Barat, 2020).

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, penanganan permasalahan sampah dapat dilakukan dengan prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (Republik Indonesia, 2012). Prinsip 3R ini merupakan pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah dari sumbernya adalah dengan menggunakan infrastruktur seperti Bank Sampah (Purwendah, 2022).

Bank sampah merupakan suatu lembaga pengelolaan sampah, yang menerapkan prinsip 3R (*reuse*, *reduce*, *recycle*) atau salah satunya dengan nilai ekonomis (Ariefahnoor *et al.* 2020). Bank sampah didirikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Menurut Auliani (2020), bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas bank sampah. Sampah yang disetorkan oleh pelanggan akan ditimbang dan dinilai dengan sejumlah uang, sampah tersebut nantinya akan dijual ke pabrik atau di daur ulang atau dapat juga diserahkan ke agen daur ulang setempat untuk diolah. Bank sampah mempunyai peranan penting dalam penanganan permasalahan sampah di masyarakat dan mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, seperti memberikan lapangan kerja dan

tambahan penghasilan bagi nasabah bank sampah, serta membangun hubungan sosial dalam masyarakat (Nani & Selvi, 2019 ; Khan *et al.* 2022).

Tabel 1. 2 Bank Sampah Aktif di Bangkalan

No	Nama Bank Sampah	Berdiri	Jumlah Sampah Dikelola	Wilayah Pelayanan
1.	BS. Lavender	2012	2-3 Ton/bulan	Kecamatan Bangkalan
2.	BS. Raddin Koneng	2015	0,8-1,2 Ton//bulan	RW 3 Kel Mlajah
3.	BS. Halim 2	2015	0,8-1,4Ton /bulan	Perum Halim 2 RW 1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan memiliki 3 Bank Sampah yang masih aktif yang tersebar di beberapa wilayah di Bangkalan yang dapat mendukung upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Akhir (TPA), serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tiga bank sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan tersebut dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan bukan di bawah pengawasan langsung ataupun binaan dari DLH (dinas lingkungan hidup) Kabupaten Bangkalan. Bank Sampah Lavender berperan sebagai bank sampah induk, sedangkan Bank Sampah Raddin Koneng dan Bank Sampah Halim berperan sebagai bank sampah unit. Bank sampah induk merupakan lembaga yang mengkoordinasikan bank sampah di wilayahnya, mengumpulkan, memilah, dan mengelola sampah secara terorganisir (KLHK, 2023). Sedangkan bank sampah unit adalah bank sampah yang berlokasi di tingkat masyarakat (RT/RW), sekolah/fasilitas pendidikan dan dunia usaha (KSBB Persampahan, 2021). Sistem pengelolaan dari Bank Sampah Lavender sebagai bank sampah induk adalah

dengan melakukan pembelian sampah kepada nasabahnya sendiri atau bank sampah unit. Sedangkan bank sampah unit sebagai mitra dari bank sampah induk yang berperan dalam menampung sampah dari nasabahnya.

Transaksi sampah plastik di bank sampah akan mencerminkan dinamika struktur pasar yang unik dan inovatif dalam pengelolaan sampah. Syafii, *et al.*, (2023) menyatakan secara sederhana, struktur pasar merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang dapat berpengaruh kepada tingkat persaingan di pasar. Struktur pasar yang ideal adalah struktur pasar persaingan sempurna, karena beberapa karakteristik dari pasar ini menguntungkan bagi penjual dan pembeli (Arifin, 2023). Penjual dan pembeli pada struktur pasar persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga penjual dan pembeli mendapatkan harga dengan adil. Selain itu, informasi pasar pada pasar persaingan sempurna, memungkinkan semua pelaku pasar mengetahui harga dan kualitas produk secara transparan. Adapun kemudahan untuk bergabung dalam pasar persaingan sempurna, memungkinkan penjual untuk berpartisipasi dalam sistem pasar persaingan sempurna yang mengindikasikan *free entry* dan *exit*.

Transaksi sampah plastik tersebut akan membentuk saluran transaksi sampah. Saluran transaksi ini dapat berfungsi untuk mengetahui informasi harga atau nilai *margin* di masing-masing pelaku transaksi sampah (Firdaus, 2012). masyarakat mengumpulkan sampah yang telah dipilah kemudian disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dinilai. Masyarakat menerima kompensasi berdasarkan berat dan jenis sampah yang disetorkan. Sampah yang telah diproses di bank sampah kemudian akan dijual ke pengepul atau langsung ke pabrik daur ulang.

Transaksi erat kaitannya dengan *margin* transaksi sampah. Panjangnya saluran transaksi dalam lembaga penjualan sampah membuat sebagian pelaku saja yang

mendapatkan *margin* yang lebih tinggi. Saluran transaksi yang melibatkan banyak pelaku pasar cenderung memiliki saluran transaksi yang panjang, sehingga meningkatkan biaya dan mengurangi *margin* bagi setiap pelaku di sepanjang saluran transaksi. *Margin* transaksi sampah dapat memberikan gambaran tentang keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi sampah (Haryani, Dewi, Tian Mulyaqin, 2013). Perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen tersebut menyebabkan besar kecilnya *margin* transaksi sampah. Bank sampah mendapatkan keuntungan dari transaksi sampah, sementara nasabah menerima pendapatan berdasarkan jumlah dan jenis sampah yang mereka setorkan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk struktur pasar pada transaksi sampah plastik di Kabupaten Bangkalan?
2. Berapakah nilai *margin* transaksi sampah plastik di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk struktur pasar sampah plastik di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk menganalisis nilai *margin* transaksi sampah plastik di Kabupaten Bangkalan

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan ke depan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah